



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASIP KHOLBIHI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **51754**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.900.000.000**

1. Tanah Seluas 96 m2 di PEKALONGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/300 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 3560 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 16000 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 585.800.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA CITYCAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. LAINNYA, SELIS SEPEDA LISTRIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA GUNUNG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
7. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI



Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 49.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 295.442.302

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 170.000.000

**Sub Total**

Rp. 3.000.242.302

**III. HUTANG**

Rp. 13.600.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.986.642.302

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.